

**PERAN KJRI KOTA KINABALU DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN
BAGI ANAK-ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA (BMI) DI SABAH**

Oleh

Laura Rema Andita¹; Christy Damayanti², Herning Suryo³

Abstrack

Sabah is a state in Malaysia which has a huge number of Indonesian Migrant Workers. The population of migrant workers are pretty much the responsibility of the Consulat General of Indonesia in Kinabalu., including the issue of education is a right that must be fought by the Indonesian state irrespective of existence that are outside the territory of Indonesia. By using the theory of national interest, diplomacy, and nationalism, researchers conducted a study on how the role of the Consulate General of Indonesia in Kinabalu to improving access of education for the children migrant worker in Sabah. This study used a qualitative descriptive method using primary and secondary data., when Andhika Bambang Supeno as the Executing Social and Cultural Consulate General of Indonesia in Kinabalu and Shelya Regina as a teacher of art and culture at Indonesian School in Kinabalu. Results can be concluded Consulate General of Indonesia in Kinabalu's role in improving access of education for children of migrant workers in Sabah which is done through a function representing, negotiating, and protecting not optimal because. 1. Internal factors, namely the limited financial and human resources support. 2. External factors, consent of the State Government of Sabah. 3. The lack of awareness of parents of children of migrant workers on the importance of education also that educational access location of residence. In the scale of international relations, the role of the Consulate General of Indonesia in Kinabalu could improve bilateral relations between Indonesia and Malaysia, particularly the education of children of migrant workers.

Key words: *access of education, the role of the Consulate General of Indonesia in Kinabalu*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia (*human basic need*) dan hak setiap manusia untuk meraihnya sebagaimana dinyatakan dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948 pasal 26 bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan”. Dewasa ini, perbincangan pendidikan telah menjadi bahasan penting di tingkat internasional. Lebih lanjut, di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan kerjasama internasional ditingkatkan melalui bidang pendidikan dengan harapan dapat meningkatkan pembangunan negara yang bersangkutan, serta isu pendidikan diperlukan bagi pencitraan negara di mata dunia. Dalam Deklarasi Jomtien, Thailand pada tahun 1990 yang dihadiri oleh 155 pemimpin Negara menghasilkan deklarasi pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagai komitmen bersama untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap manusia. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis bagi suatu negara dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks hubungan diplomatik, Republik

Indonesia (RI) dan Malaysia telah lama menjalin kerjasama internasional di bidang pendidikan. Kerjasama RI-Malaysia di bidang pendidikan telah berlangsung sejak kedua negara membuat *Joint Agreement* bidang pendidikan dan budaya sebagai payung kerjasama pada tahun 1972. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia, mengingat amanat yang terkandung dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945 bahwa “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang*”. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia menempatkan perwakilannya di Malaysia dalam rangka memberikan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tinggal disana yang merupakan tindak diplomasi. menurut Louise Diamond, diplomasi merupakan proses politik damai antara Negara bangsa yang mengharapkan struktur yang dapat membentuk dan mengatur hubungan sistem internasional serta mengakomodasi kepentingan suatu Negara

(Louise Diamond, 1996: 26). KJRI Kota Kinabalu merupakan salah satu perwakilan RI di Malaysia yang memiliki tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan nasional Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Malaysia khususnya di wilayah Sabah.

Sabah adalah salah satu negara bagian Malaysia yang berada satu pulau dengan provinsi di Indonesia yaitu di Timur Laut pulau Kalimantan. Sabah adalah negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Serawak. Sabah juga berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara Indonesia, di sebelah selatan. Ibukota negara bagian ini adalah Kota Kinabalu. Mayoritas tenaga kerja perkebunan, terutama kelapa sawit di Sabah didominasi oleh BMI. Dengan banyaknya peluang pekerjaan yang rata-rata dikuasai oleh perkebunan sawit, maka tidak heran warga negara Indonesia berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan di Sabah. Upah yang mereka terima jauh lebih tinggi, dibandingkan upah di Indonesia. Melihat kronologi kedatangan Warga Negara Indonesia yang berkerja sebagai BMI di Sabah, fenomena yang didapati adalah jumlah anak-anak BMI di Sabah mayoritas didominasi oleh anak-anak yang lahir dan tinggal di dekat perkebunan kelapa sawit tempat orangtua mereka berkerja. Anak-anak tersebut juga berhak untuk memperoleh pendidikan dasar seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1, bahwa Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga Negara baik yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar negeri. Namun kenyataannya, anak-anak BMI di Sabah, mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor; kurangnya kelengkapan dokumen, upah orangtua mereka yang relatif rendah, serta perkawinan siri (tanpa dokumen Negara) orangtua mereka yang menyebabkan anak-anak BMI tersebut lahir tanpa memiliki akte kelahiran. Selain itu, pengetahuan mereka terhadap bangsa Indonesia sendiri juga

sangat rendah. Terbukti pada saat peneliti mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kota Beaufort (19/10/2015), peneliti mendapati anak-anak disana belum menghafal dengan baik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka juga belum mengenal bendera dan lambang Negara Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, anak-anak BMI di Sabah juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang Negara Indonesia, dengan harapan rasa nasionalisme akan terbentuk dalam diri mereka walaupun mereka tidak tinggal di Indonesia. Pengetahuan mengenai sejarah Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia masih belum didapatkan oleh anak-anak BMI di Sabah yang merupakan rasa nasionalisme. Nasionalisme pada umumnya merupakan perasaan cinta terhadap tanah air. Nasionalisme sangat penting sebagai unsur yang membentuk dan memelihara identitas nasional suatu Negara. Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi kemajuan bangsa Indonesia, mengingat masa depan Indonesia berada di tangan anak-anak sebagai generasi penerus. Dalam perjalanan dan perkembangannya, masih banyak anak-anak BMI yang belum memperoleh pendidikan dasar. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan memenuhi hak dasar memperoleh pendidikan bagi mereka, yakni dengan didirikannya Community Learning Centre (CLC). CLC merupakan PKBM yang didirikan dari komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas masyarakat setempat di wilayah Sabah yang belum memperoleh akses pendidikan. Pendirian CLC dilakukan menyebar ke seluruh Sabah dengan harapan mampu menampung anak-anak BMI usia sekolah di Sabah, dengan KJRI Kota Kinabalu bertindak sebagai mediator dan fasilitatornya.

Pemerintah Indonesia melalui KJRI Kota Kinabalu terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang sudah terselenggara di Sabah yang merupakan kepentingan nasional. kepentingan nasional yang lebih mengacu pada hal yang deskriptif adalah sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jumlah waktu tertentu (K.J. Holsti, 1987:176). Peran KJRI Kota Kinabalu memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah. KJRI Kota Kinabalu

merupakan mediator utama dalam melakukan diplomasi di bidang pendidikan untuk anak-anak BMI, selain itu KJRI Kota Kinabalu juga memiliki kewajiban sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak BMI, memberikan penjaminan dan pengurusan dokumen para pendidik, dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Negeri Sabah agar terselenggara layanan pendidikan yang layak untuk anak-anak BMI di Sabah. Penelitian ini membahas mengenai peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah, Malaysia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian menggunakan peran KJRI kota kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Bapak Andhika Bambang Supeno selaku Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu dan Shelya Regina selaku Guru Seni dan Budaya SIKK. Data sekunder diperoleh peneliti dari literatur, artikel, jurnal. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan secara langsung (observasi), dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Hubungan Internasional dilaksanakan atas suatu dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Maka Hubungan Internasional dianggap sangat penting bagi suatu negara. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri: "Hubungan internasional atau hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah dan lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara Indonesia". Dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri: "Perubahan dan perkembangan yang

terjadi di tingkat nasional dan internasional telah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas organisasi dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, dan juga bahwa diperlukan aparatur pelaksana diplomasi yang berkualitas agar penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri lebih terfokus, selektif, komprehensif, terkoordinasi, efisien, dan efektif". Pada Pasal 2 pembagian Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri terdiri dari perwakilan diplomatik, yang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Perutusan tetap Republik Indonesia serta perwakilan konsuler, yang meliputi Konsulat Republik Indonesia (KRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Secara umum, tugas dan fungsi seorang diplomat adalah *Representing*, yaitu fungsi seorang diplomat untuk mewakili sebuah negara-bangsa di negara penerima dan memperjuangkan kepentingan yang ditugaskan kepadanya, *Protecting* atau perlindungan, yaitu melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang diwakilinya di negara penerima berdasarkan batas-batas hukum internasional, *Negotiating* atau perundingan, yaitu fungsi yang merujuk pada peran diplomat sebagai seorang negosiator yang memperjuangkan kepentingan nasional negara yang diwakilinya, *Reporting* atau pelaporan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh seorang diplomat untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya di negara penerima atau organisasi internasional, dan *Promoting*, yaitu yang berkaitan dengan segala upaya untuk meningkatkan kerjasama multi dimensional di antara negara yang diwakilinya dengan negara penerima (Iucu, 2010).

Dalam persoalan non-politik, hubungan luar negeri satu negara dengan negara lain diwakili oleh korps konsuler. Perbedaan mendasar antara perwakilan konsulat dan perwakilan diplomatik adalah bahwa perwakilan konsulat bertindak melayani berbagai kepentingan, baik untuk Negara lain maupun negara yang diwakilinya. Perwakilan konsulat tidak mempunyai kewenangan sebagai

perwakilan diplomatik dan tidak bertindak mewakili negaranya. Konsulat berhubungan dengan otoritas setempat dan tidak dengan pemerintah pusat Negara Penerima. Walaupun KJRI Kota Kinabalu secara teori tidak melakukan fungsi perwakilan diplomatik, namun dalam prakteknya KJRI Kota Kinabalu secara tidak langsung tetap menjalankan tugas diplomatik dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawabnya sebagai perwakilan RI di Sabah karena secara organik KJRI Kota Kinabalu merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji peran KJRI Kota Kinabalu dalam menjalankan fungsi *representing*, *negotiating*, dan *protecting*. KRI Kota Kinabalu menjadi perwakilan diplomatik pertama di Sabah sejak tahun 1961. Setelah 16 tahun konsulat Republik Indonesia melakukan berbagai tugas untuk kepentingan Republik Indonesia (1968-1984), maka pada bulan April 1984 Status Konsulat Republik Indonesia (KRI) dinaikkan menjadi Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI). KJRI Kota Kinabalu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya, serta dalam bidang kekonsuleran dan imigrasi. Penelitian ini akan membahas mengenai peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah.

Sabah adalah salah satu negara bagian di Malaysia yang terletak berdampingan secara geografis dengan Negara Brunei Darussalam dan Provinsi Kalimantan Indonesia, yang mana 70% daerahnya masih berupa perkebunan. Oleh karena minyak sawit adalah komoditi utama Negeri ini dan sebagai sektor utama bagi pertumbuhan ekonomi Sabah dan Malaysia secara umumnya, maka tidak menuntut kemungkinan diperlukanlah para pekerja ladang sawit yang banyak. Selain sektor perladangan, terdapat banyak sektor pekerjaan lain di Sabah, yaitu sektor petroleum, kontruksi, nelayan, dan pembantu (*mad*). Sehingga ribuan BMI tertarik untuk bekerja di Sabah. Faktor utama WNI memilih mencari pekerjaan di Sabah adalah lokasi (Sabah dekat ke Indonesia), hubungan keluarga dan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kemungkinan pendapatan yang lebih tinggi.

Selama bertahun-tahun para BMI bermukim di ladang-ladang yang terletak di pelosok wilayah Sabah, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal hingga berkeluarga dan memiliki keturunan. Sesuai yang tercantum dalam ketentuan Keimigrasian Malaysia terhadap pekerja asing, bahwa pekerja asing yang berprofesi sebagai pekerja perkebunan sawit, tukang, penjaga toko, pekerja pabrik, pembantu rumah tangga, dan yang memiliki penghasilan <5000 RM tidak diizinkan membawa keluarga. Sedangkan pekerja asing yang berprofesi sebagai staf perwakilan, ekspatriat, dosen, mahasiswa, tenaga professional lainnya diizinkan membawa keluarga. Meskipun terdapat larangan membawa keluarga dan menikah, namun tetap banyak BMI yang membawa keluarga dan menikah tidak resmi, sehingga banyak menimbulkan masalah, yakni tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Berdasarkan data pada tahun 2014, terdapat 486.000 WNI yang berkerja di Sabah. Apabila BMI yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang itu tidak memiliki dokumen resmi kewarganegaraan, begitu pula anak-anak mereka yang berada disana. Padahal dokumen tersebut diperlukan untuk memperoleh pendidikan. Faktor utama yang menghambat anak-anak BMI untuk memperoleh pendidikan adalah tidak adanya akte kelahiran, sehingga memberi dampak pada ketidakjelasan status anak-anak tersebut sebagai warga Negara. Sedangkan, Pemerintah Malaysia hanya akan memberikan pelayanan pendidikan untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal secara legal (memiliki dokumen pribadi), mempunyai tempat tinggal serta status keimigrasian. Dari sinilah timbul masalah yang kompleks, dimana para BMI hanya mempunyai visa (permit) untuk dirinya sendiri dan tidak bisa menanggung visa (permit) atau bahkan paspor untuk anak-anak mereka. Faktor lain adalah upah para BMI yang relatif rendah, sehingga tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kebangsaan atau sekolah swasta di Sabah. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1, bahwa Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga Negara baik yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar negeri, maka anak-anak BMI yang lahir di Sabah juga berhak mendapatkan pendidikan seperti layaknya anak-anak Indonesia lainnya. Selain itu, sulitnya perizinan untuk bersekolah memaksa anak-anak tersebut untuk hidup dalam buta huruf. Jarak antara perkebunan juga cukup jauh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi menuju ke sekolah dinilai cukup mahal bagi BMI yang berkerja di perkebunan sawit. Hal ini semakin menghambat anak-anak BMI untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelenggarakan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah, yaitu dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan Pemerintah Malaysia. Ketersediaan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah meliputi:

LSM Humana Child Aid Society

Kesepakatan antara pemimpin RI-Malaysia selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pihak RI yang terdiri dari KJRI Kota Kinabalu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Kuala Lumpur dengan pihak Malaysia yang terdiri dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, Jabatan Imigrasi Malaysia Sabah, Persatuan Perkebunan Sabah, Perusahaan-perusahaan Perladangan, dan LSM *Humana Child Aid Society*. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yaitu diizinkan LSM *Humana Child Aid Society* untuk melaksanakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di ladang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Humana Child Aid Society* yaitu sebuah LSM asal Denmark yang bergerak dalam bidang pendidikan. LSM tersebut memulai layanan bagi anak-anak pekerja asing di Sabah sejak tahun 1991 dengan fokus utama anak-anak pekerja asing yang berasal dari Indonesia dan Filipina. Keberadaan LSM Humana bekerjasama dengan KJRI Kota Kinabalu khusus di wilayah pedalaman atau perkebunan sawit yang jauh dari keramaian. Tujuan mendasar dari LSM Humana adalah untuk membantu memenuhi konvensi PBB tentang “Hak Anak”, yang menekankan bahwa semua anak memiliki hak untuk pendidikan dasar. Visi LSM Humana adalah agar semua anak memiliki kesempatan

untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan anak-anak yang kurang beruntung di Sabah mendapat pendidikan sekaligus dorongan untuk mencari masa depan yang lebih baik.

Pendidikan bagi anak-anak BMI telah diselenggarakan oleh LSM Humana atau *Non Governmental Organization (NGO) Humana Child Aid Society* Sabah yang merupakan organisasi sosial non-profit Malaysia dengan pendiri seorang berkewarganegaraan Swedia. Lembaga ini khusus memberikan perhatian berupa layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja di perkebunan sawit khususnya di negeri bagian Sabah, Malaysia dan telah mendapat izin operasional dari pemerintah setempat. Meskipun terdaftar sebagai lembaga non-formal, namun Humana menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengacu kepada kurikulum Malaysia. Mata pelajaran yang diajarkan di lembaga ini adalah membaca, menulis, berhitung/ Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Melayu, IPA dan pelajaran tambahan seperti kesenian dan olahraga. Selama ini LSM Humana banyak melibatkan guru-guru Melayu dan Filipina untuk mengajar anak-anak BMI. Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu bahwa anak-anak Indonesia yang berada pada usia sekolah berkisar 24.199 anak. Dari jumlah tersebut sekitar 9.000 telah ditangani melalui NGO International Humana melalui pusat bimbingan yang tersebar di negara bagian Sabah, yakni Tawau, Sandakan, Lahad Datu, dan Kinabatangan dan unsur-unsur masyarakat yang berada di Sabah. Untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak BMI tersebut, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Malaysia telah membuat kesepakatan, yakni Pemerintah Malaysia menyetujui Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tenaga pengajar (guru) untuk mendidik anak-anak BMI di Sabah. Program khusus pengiriman guru Indonesia dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Keterlibatan guru-guru Indonesia di pusat-pusat bimbingan Humana diharapkan

mampu memberikan pengetahuan kepada anak-anak BMI tentang Indonesia. Sebab banyak dari anak-anak BMI yang lebih mengenal adat istiadat, bahasa dan budaya Malaysia daripada tentang tanah airnya sendiri. Guru dan tenaga pendidik Indonesia selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum Malaysia juga memberikan pelajaran terkait dengan Indonesia. Karena itu, kemudian disepakati untuk tetap menggunakan kurikulum Malaysia dengan menambahkan beberapa mata pelajaran yang menyangkut kurikulum Indonesia, seperti PPKN/ Pancasila, Bahasa Indonesia, Geografi Indonesia, Agama dan ketrampilan seni Indonesia. Namun, pendidikan yang dihasilkan oleh LSM Humana *Child Aid* itu ternyata tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah di Indonesia. Karena mata pelajaran yang diajarkan lebih dominan pada kurikulum Malaysia, sehingga tidak sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Bertolak dari keadaan tersebut, dipandang perlu untuk mendirikan sekolah formal berkurikulum Indonesia yang dapat melayani pendidikan secara memadai. Seperti pernyataan bersama antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Haji Ahmad Badawi yang telah dilaksanakan pada *Annual Consultations 2006*, bahwa Pemerintah Malaysia menyetujui dan mendukung pendirian Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Maka Menteri Luar Negeri Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 120/DI/VI/2008/02/01 tanggal 16 Juni 2008 mengajukan permintaan kepada Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mendirikan Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Sekolah tersebut bernama Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)

SIKK merupakan Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ke-15 dan didirikan pada tahun 2008. Pendirian SIKK dilatarbelakangi banyaknya anak-anak BMI yang tidak dapat belajar di sekolah milik Pemerintah Malaysia karena orang tua mereka terkendala MoU pemerintah federal, yang menjelaskan bahwa *migrant worker* tidak dibenarkan membawa tanggungan untuk bekerja di Malaysia. Oleh sebab itu, SIKK didirikan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Sabah,

Malaysia. SIKK mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2008 setelah mendapat izin dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan beberapa lembaga terkait di Sabah, Malaysia. Dengan adanya SIKK diharapkan anak-anak Indonesia di Sabah akan mendapatkan akses pendidikan yang layak sebagaimana yang diperoleh anak-anak Indonesia pada umumnya. Visi SIKK adalah mencetak insan yang jujur, berakhlak mulia, jiwa nasionalisme, cerdas dan terampil. Sedangkan, misi dari SIKK adalah memiliki semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan, membentuk siswa-siswa yang kreatif dan inovatif, melahirkan insan-insan yang berkualitas dari segi akhlak dan akademik, terwujudnya sistem pendidikan yang berlandaskan IPTEK dan imtaq, memiliki keterampilan yang berkaitan dengan akar budaya bangsa. SIKK terdaftar di Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai sekolah "*Ekspatriat School*" yaitu sekolah yang diperuntukan untuk anak-anak yang orangtuanya berprofesi sebagai ekspatriat, diplomat, atau profesional. Namun pada kenyataannya sekolah tersebut menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan masyarakat Indonesia yang ada di Sabah, termasuk anak-anak dari BMI yang tidak memiliki dokumen yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia di Sabah agar dapat menikmati pendidikan dan mengurangi beban masalah pendidikan. Kondisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan pada tahun 2010 pihak Kementerian atas perbincangan dengan Setia Usaha Kerajaan dan pihak Imigresen bahwa SIKK dapat menerima anak-anak BMI dan memperoleh visa pelajar. Kenyataannya SIKK hanya bisa menampung anak-anak BMI yang memiliki akta lahir/ kartu pelajar, sehingga hanya dapat memberi layanan pendidikan secara formal. SIKK ternyata hanya mampu melayani pendidikan anak-anak BMI yang berada di Kota Kinabalu dan daerah sekitarnya. Ini bermakna, bahwa SIKK belum bisa menjangkau kepentingan pelayanan pendidikan anak-anak BMI di seluruh Sabah. Akibatnya, aksesibilitas mereka ke pendidikan pun juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah terobosan sebagai solusinya untuk menyediakan akses pendidikan dan memenuhi hak dasar memperoleh pendidikan bagi mereka, yakni melalui

pendirian CLC. Bahkan, terobosan itu dilakukan dengan rencana mendirikan sebanyak mungkin CLC di Sabah (Permana, 2015: 11).

Community Learning Centre (CLC)

CLC merupakan institusi pendidikan dasar yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. CLC didirikan sesuai dengan hasil pertemuan JCBC RI-Malaysia ke-13, yang diselenggarakan di Jakarta, pada 2 Desember 2013, bahwa Pemerintah Malaysia memberikan izin pendirian Community Learning Center (CLC) di Sabah untuk anak-anak BMI yang bekerja di area perkebunan dengan merujuk pada panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam konteks ini, peran KJRI Kota Kinabalu dan SIKK adalah sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas pada tenaga pendidik. Sasaran CLC adalah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada anak-anak usia sekolah tetapi tidak sekolah, anak-anak yang belum sekolah, anak-anak buta aksara, dan anak-anak yang kebutuhan pendidikannya tidak terpenuhi di pendidikan formal. Tujuan CLC adalah memberikan pendidikan kepada anak usia sekolah. Untuk memberdayakan CLC, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. KJRI Kota Kinabalu dan SIKK akan menjadi *supervisor* dan fasilitator. Pemberdayaan ini dilakukan karena 98% anak usia sekolah itu tinggal bersama orang tuanya di ladang sawit. Untuk itu, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan dan merangkul perusahaan (syarikat) tempat orang tua anak-anak itu bekerja. Hasil kerjasama itu di antaranya adalah pihak perusahaan menyediakan kemudahan pembelajaran dalam bentuk ruang belajar, tenaga pendidik sementara, dan sebagian biaya operasional sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*).

Pada dasarnya tujuan keberadaan CLC di suatu masyarakat adalah terwujudnya peningkatan mutu kehidupan masyarakat tersebut. Dalam konteks Sabah, CLC bertujuan meningkatkan mutu hidup masyarakat khususnya pendidikan masa depan anak-anak BMI di Sabah. Dalam konteks Sabah, hanya ruang lingkup pertama yang difokuskan karena itu yang

menjadi prioritas. Kegiatan pembelajaran CLC di Sabah mencakup Program pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Kesetaraan SD (Paket A), SMP (Paket B), SMA (Paket C) dan Program Pendidikan Keterampilan. Komponen CLC adalah warga atau kelompok belajar (anak-anak peserta didik), tenaga pendidik dan narasumber, penyelenggara, pengelola, dan mitra (perusahaan perladangan) sebagai kontributor untuk diajak bekerja sama mengembangkan CLC melalui berbagai bantuan, seperti penyediaan ruang belajar, rumah guru, asrama (*boarding school*). Untuk prasarana, seperti alat mengajar akan dibantu Perwakilan RI untuk Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pendidik/ tutor/ narasumber teknis adalah sebagian dari warga masyarakat ataupun dari luar masyarakat yang bertanggung jawab langsung atas keberlangsungan kegiatan pembelajaran di CLC. Pendidik CLC di Sabah adalah pendidik yang dikirim dari Indonesia dan pendidik berwarga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Sabah, dan pendidik yang berwarga negara Malaysia. Penyelenggara dan pengelola CLC adalah satu atau beberapa warga masyarakat setempat yang bertanggungjawab atas kelancaran dan pengembangan CLC serta bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkannya. Kurikulum *Community Learning Centre (CLC)* menggunakan kurikulum Indonesia. Dengan demikian tiap CLC diperlukan guru/ tenaga pendidik yang memadai agar semua mata pelajaran dapat diajarkan (Permana, 2015: 21).

Peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah

Sebagai perwakilan RI di luar negeri, KJRI Kota Kinabalu memiliki tugas untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di Sabah. Dalam hal ini, kepentingan nasional Indonesia yang dimaksud adalah mengenai pendidikan bagi anak-anak BMI yang berada di Sabah. Wujud peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan pendidikan bagi pendidikan anak-anak BMI di Sabah secara umum dinyatakan dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Perwakilan Konsuler, namun secara organik KJRI Kota Kinabalu

merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri, sehingga juga menjalankan fungsi diplomatik. Penelitian ini membahas 3 fungsi diplomatik yang dijalankan oleh KJRI Kota Kinabalu, yaitu:

1. Representasi (*Representing*)

Representasi yaitu Perwakilan RI memiliki tugas untuk mewakili pemerintah negara pengirim di negara penerima. Selain itu Perwakilan RI juga mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima dan mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Peran KJRI Kota Kinabalu secara representasi antara lain sebagai berikut: (1) mewakili Pemerintah Indonesia. KJRI Kota Kinabalu merupakan perwakilan dari Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan kekonsuleran di Sabah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan kenegaraan antara lain menghadiri undangan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri Sabah, menghadiri undangan peringatan hari-hari nasional maupun hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri Sabah; (2) Mewakili WNI yang berada di Sabah. KJRI Kota Kinabalu merupakan perwakilan dari Pemerintah Indonesia dalam mewakili Kemdikbud RI menyampaikan permohonan visa tinggal (*stay permit*), yaitu izin tertulis yang diberikan pada orang asing yang akan tinggal di suatu negara tertentu. Untuk seseorang yang akan bekerja, biasanya akan digunakan visa tinggal terbatas dan ijin mengajar (*teaching permit*) bagi guru-guru yang akan ditempatkan di Sabah. *Teaching Permit*, yaitu ijin mengajar yang diberikan Pemerintah Negeri Sabah bagi tenaga pendidik yang dikirim dari Indonesia untuk ditempatkan di Sabah. Selain itu, KJRI Kota Kinabalu juga mewakili SIKK dan CLC mengajukan permohonan visa pelajar kepada Jabatan Imigrasi bagi siswa SIKK dan CLC. Peran tersebut dipertegas dalam wawancara dengan Andhika Bambang Supeno selaku Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu:

“Peran KJRI Kota Kinabalu dalam fungsi representasi dilakukan dengan menghadiri berbagai undangan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri Sabah, menghadiri undangan peringatan hari-hari nasional maupun hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri

Sabah, kemudian mewakili Kemdikbud RI untuk menyampaikan permohonan visa, *stay permit*, dan *teaching permit* bagi guru-guru yang dikirim ke Sabah. Mewakili SIKK dan CLC mengajukan permohonan visa pelajar kepada Jabatan Imigrasi Sabah juga merupakan tanggungjawab KJRI Kota Kinabalu”. (Andhika Bambang Supeno, 14 Oktober 2015)

Dalam hal ini KJRI Kota Kinabalu bertindak sebagai perwakilan dari Pemerintah RI dalam menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Negeri Sabah. Andhika Bambang Supeno juga mengatakan bahwa peran *representing* yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu diikuti dengan negosiasi (*negotiating*) untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak BMI di Sabah.

2. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi yaitu Perwakilan RI memiliki tugas untuk melakukan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara-negara lainnya. Teknik negosiasi merupakan seni dari diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan RI dalam mewujudkan kepentingan Indonesia di Sabah. Dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis, Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu, Andhika Bambang Supeno mengatakan:

“Dalam prakteknya, upaya representasi itu bisa diikuti dengan upaya negosiasi. Negosiasi yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu pada saat melakukan pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Negeri Sabah itu. Misalnya, bertemu dengan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/ Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri Sabah dan JPNS/ Dinas Pendidikan Provinsi Negeri Sabah tentang misi dan visi CLC sebagai sekolah non-formal bagi anak-anak BMI di Sabah, karena Pemerintah Negeri Sabah masih kurang paham mengenai sekolah non-formal. KJRI Kota Kinabalu berupaya agar seluruh CLC memiliki legalitas dan melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap Pemerintah Sabah agar CLC yang belum memiliki ijin tetap bisa beroperasi.” (Andhika Bambang Supeno, 14 Oktober 2015)

Pendirian CLC non ladang atau ladang oleh perorangan atau badan/ yayasan perlu ditertibkan agar memiliki legitimasi dan alur yang jelas. Semua CLC harus terdaftar di KJRI Kota Kinabalu dan pendaftaran CLC ke JPNS hanya diperbolehkan melalui Kantor Perwakilan RI di Sabah. Tugas KJRI Kota Kinabalu adalah menerbitkan surat dukungan pendirian CLC, menerbitkan surat permohonan pendirian CLC ke Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), serta menerbitkan surat permohonan perpanjangan izin (*permit*) pendirian CLC ke JPN. Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu, Andhika Bambang Supeno dalam wawancara mengatakan bahwa peran KJRI Kota Kinabalu sebagai perwakilan RI dalam hal ini adalah berupaya agar seluruh CLC memiliki legalitas dan melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap Pemerintah Sabah agar CLC yang belum memiliki ijin tetap bisa beroperasi. Pendekatan tersebut dilakukan dengan bertemu dengan JPNS untuk membahas ijin mengajar bagi guru, pendaftaran CLC, dan membahas permasalahan terkait perijinan CLC, bertemu dengan pihak imigrasi untuk membahas ijin tinggal para guru, ijin masuk, visa, pertemuan untuk guru, bertemu dengan pemangku kepentingan dan pejabat pendidikan daerah Sabah untuk membahas perijinan pendirian CLC serta perluasan akses pendidikan, bertemu dengan pihak Majelis Keselamatan Negeri (MKN) Sabah, kepolisian distrik dan perusahaan sawit membahas tentang kemungkinan pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah. Andhika Bambang Supeno selaku Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu memaparkan contoh kasus salah satu CLC yang tidak diperbolehkan untuk beroperasi:

“Seperti kasus salah satu CLC yang berada di daerah Kimanis, Papar, yaitu CLC Tunas Harapan Bangsa yang berhenti beroperasi selama 8 bulan pada tahun 2015 karena Jabatan Pendidikan Daerah di Sabah memberikan peringatan, sanksi denda dan penjara terhadap pengelola CLC. Dengan pendekatan (*approach*) dan negosiasi yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu terhadap pemangku kepentingan di Sabah dan daerah Papar, CLC Tunas Harapan Bangsa dapat kembali beroperasi pada bulan April 2016.” (Andhika Bambang Supeno, 24 Agustus 2016)

3. Proteksi (*Protecting*)

Proteksi yaitu Perwakilan RI bertanggung jawab untuk melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Proteksi yang dilakukan oleh KJRI antara lain sebagai berikut:

a. Penyediaan dokumen identitas. Sebagai Perwakilan RI di Sabah, KJRI Kota Kinabalu memiliki tugas untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada BMI dan anak-anak mereka yang memiliki permasalahan dokumen. Pelayanan tersebut diberikan melalui penyediaan dokumen identitas sebagai berikut:

1) Dokumen tinggal. KJRI Kota Kinabalu memberikan pelayanan konsuler dan imigrasi bagi BMI yang hendak mengurus kelengkapan dokumen mereka. Pelayanan tersebut antara lain; pembuatan paspor, visa kerja, perpanjangan paspor, visa kerja, dan menerima pengaduan dari BMI di Sabah. Pemerintah Kerajaan Malaysia juga memberikan kemudahan bagi BMI yang berstatus ilegal dengan mengadakan Program Pemutihan 5P (Pendaftaran, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, dan Pengusiran). Dalam hal ini, KJRI Kota Kinabalu sebagai perwakilan RI memiliki peran untuk membantu mendaftarkan BMI yang masuk dalam kategori program pemutihan kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia dan mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dokumen bagi BMI yang harus dipulangkan ke Indonesia. Dengan adanya program pemutihan tersebut, telah memberi status sah (*legal*) kepada BMI dan anak-anak mereka. Hal ini mempermudah anak-anak BMI dalam memperoleh akses pendidikan, karena orangtua mereka sudah menjadi BMI yang berdokumen lengkap. Sosialisasi ke daerah-daerah terpencil juga dilakukan oleh KJRI Kota Kinabalu untuk meningkatkan kesadaran BMI akan pentingnya kelengkapan dokumen bagi keberlangsungan hidup mereka dan anak-anak mereka. Pada saat melakukan magang terpadu di KJRI Kota Kinabalu, peneliti juga mengikuti jalan dinas KJRI Kota Kinabalu guna melakukan sosialisasi pengurusan dokumen di Beaufort, Sabah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran BMI akan

pentingnya kelengkapan dokumen dan memberi penjelasan bagi para BMI bagaimana proses mendapatkan dokumen yang sah atau memperpanjang dokumen yang sudah kadaluwarsa. Menurut pengamatan peneliti, para BMI masih kurang memahami cara untuk mendapatkan dokumen yang sah. Namun, dengan adanya sosialisasi tersebut para BMI mendapatkan kejelasan mengenai cara mendapatkan dokumen yang sah tersebut.

2) Pembuatan Akta Nikah dan Akta Lahir. Selain permasalahan dokumen, masalah perkawinan siri para BMI juga menghambat anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena status perkawinan para BMI pada umumnya tidak jelas. Mereka melakukan perkawinan secara adat dan melakukan perkawinan bukan dengan WNI serta perkawinan tersebut tanpa memiliki dokumen (tanpa akta perkawinan). Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai akte kelahiran. Tercatat, sekitar 40.000 anak-anak BMI di Sabah tidak memiliki siji kelahiran/ akta kelahiran (www.utusan.com.my). Dalam hal ini, sebagai perwakilan RI di Sabah, KJRI Kota Kinabalu bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang penetapan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) bagi pasangan suami-isteri WNI yang sebelumnya sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah. Dengan adanya istbat nikah, para BMI dapat dengan mudah mengurus akta kelahiran untuk anak-anak mereka agar dapat mendaftar pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di Sabah. Menurut pengamatan peneliti pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di KJRI Kota Kinabalu, bahwa selain melakukan itsbat nikah, KJRI Kota Kinabalu juga melayani pembuatan akta nikah bagi BMI yang menikah secara resmi dan akta kelahiran bagi anak-anak BMI yang lahir di Sabah. KJRI Kota Kinabalu juga memberikan perlindungan bagi anak-anak tersebut yang belum memiliki akta kelahiran dengan mengeluarkan *pass* pelajar agar mereka masih bisa mengakses pendidikan di Sabah.

b. Penyediaan fasilitas pendidikan. Pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga pendidik/ guru dan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Dalam hal ini, KJRI Kota Kinabalu juga bertindak

sebagai penyelia (*supervisor*) para tenaga pendidik/ guru yang dikirim dari Indonesia untuk ditempatkan di Pusat Bimbingan (PB) Humana, SIKK, dan CLC yang berada di Sabah. KJRI Kota Kinabalu melakukan serah terima tenaga pendidik dari Kemdikbud secara bertahap dan melakukan pembinaan terhadap para guru sebelum ditempatkan, yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serumpun di tiap-tiap distrik dua kali dalam setahun. KJRI Kota Kinabalu juga membantu menerbitkan surat permohonan visa tinggal tenaga pendidik, permohonan surat kelulusandari KPM, surat permohonan izin mengajar atau sering disebut *teaching permit* pendidik ke JPNS, menerbitkan surat keterangan pendidik yang bertugas di CLC, serta menerbitkan surat jalan bagi pendidik. KJRI Kota Kinabalu dapat dikatakan sebagai “Penjamin” pendidik untuk memperoleh visa tinggal dari Jabatan Imigrasi (Imigrasi) dan *permit* mengajar dari JPNS.

c. Penguatan nasionalisme bagi anak-anak BMI. Pengetahuan anak-anak BMI di Sabah terhadap Indonesia sangat rendah. Seperti yang telah diamati oleh penulis pada saat jalan dinas bersama KJRI Kota Kinabalu ke salah satu CLC di Beaufort. Anak-anak BMI yang bersekolah di CLC Beaufort belum begitu mengenal tentang Indonesia. Mereka tidak menghafal lagu Indonesia Raya dan tidak mengetahui bendera negara dan lambang Negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme didalam diri anak-anak tersebut. Sebagai perwakilan RI di Sabah, KJRI Kota Kinabalu memiliki tugas untuk melindungi status kewarganegaraan mereka dengan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi anak-anak BMI di Sabah, yang dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Pemberian materi dengan Kurikulum Indonesia

Sebelumnya, anak-anak BMI di Sabah mendapatkan kurikulum yang digunakan oleh Pusat belajar Humana Child Aid, yaitu menggunakan kurikulum Malaysia. Hal tersebut dikarenakan para siswa di PB Humana tidak hanya anak-anak Indonesia tetapi juga anak-anak Philipina, Malaysia. Humana

memfokuskan pembelajaran pada kemampuan 3M (menulis, membaca, dan menghitung) dan Humana tidak mengeluarkan ijazah kelulusan. Agar kesinambungan belajar tetap berjalan, para siswa Indonesia di Humana yang sudah duduk di kelas 5 dan 6 diberikan pembelajaran dengan kurikulum Indonesia dan dipersiapkan untuk mengikuti Ujian Paket A atau ujian akhir sekolah. Hanya ada 1 guru Indonesia untuk tiap Pusat belajar Humana dan selebihnya merupakan guru lokal yang direkrut oleh Humana. Namun setelah adanya SIKK dan CLC, anak-anak BMI tersebut mendapat pengetahuan mengenai Indonesia. Karena kurikulum yang digunakan mengacu pada metode pendidikan di Indonesia. Jadi, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak BMI di Sabah setara dengan di Indonesia. Hal tersebut dipertegas oleh Andhika Bambang Supeno selaku Pelaksana Fungsi Sosial dan Budaya dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti:

“Tenaga pendidik yang dikirim dari Indonesia itu berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak BMI terhadap tanah air Indonesia. Karena tenaga pendidik merupakan jembatan anak-anak tersebut untuk mengenal dan mencintai tanah airnya meskipun mereka tinggal di luar Indonesia. Tenaga pendidik tersebut sudah diberikan pembinaan baik dari Kemdikbud maupun KJRI Kota Kinabalu untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia.” (Andhika Bambang Supeno, 14 Oktober 2015)

Materi-materi yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada anak-anak BMI menggunakan materi yang sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Sehingga anak-anak BMI memiliki pengetahuan mengenai tanah airnya. Shelya Regina seorang Guru Seni dan Budaya SIKK dalam wawancara dengan peneliti mengatakan:

“Materi dan praktek seni budaya Indonesia diberikan kepada anak-anak di SIKK, yaitu dengan mengajarkan tarian-tarian Indonesia dan lagu-lagu daerah Indonesia dengan harapan anak-anak tersebut dapat menjaga identitas bangsa walaupun anak-anak BMI berada di luar wilayah Indonesia. Selama ini anak-anak tersebut antusias dalam mempelajari seni budaya Indonesia.” (Shelya Regina, 4 September 2016)

2) Pengenalan simbol-simbol kenegaraan dan lain-lain

Pengenalan simbol-simbol kenegaraan dilakukan dengan meletakkan bendera Merah Putih di SIKK dan CLC yang ada di Sabah. Selain itu di setiap ruang belajar terdapat foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Semangat nasionalisme juga ditanamkan dalam diri anak-anak BMI baik di SIKK maupun CLC dengan diadakannya upacara peringatan hari-hari nasional Indonesia, misalnya peringatan Hari Ulang Tahun RI pada tanggal 17 Agustus dan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pada saat melakukan magang terpadu di KJRI Kota Kinabalu, penulis juga mendapat tugas untuk mengajar di SIKK. Peneliti mengamati seragam yang dipakai oleh anak-anak BMI yang bersekolah di SIKK merupakan seragam khas bagi pelajar Indonesia, putih merah untuk pelajar SD, putih biru untuk pelajar SMP, dan putih abu-abu untuk pelajar SMA.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pada 12 Juni 2016 KJRI Kota Kinabalu telah meresmikan pembukaan CLC St. Joseph yang berada di wilayah Papar. CLC St. Joseph Papar adalah bentuk upaya Pemerintah RI dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam memperluas akses pendidikan terhadap anak-anak Indonesia di Sabah, khususnya anak-anak BMI yang berada di daerah Papar. Selain itu, pada tanggal 16 Juni 2016, atas permohonan dari begitu banyak

orangtua WNI di Sabah, akhirnya sebuah PAUD untuk pertamakalinya didirikan di lingkungan SIKK di Sabah. Dalam menjalankan ketiga peran untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah, KJRI Kota Kinabalu masih menemui berbagai hambatan, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan secara finansial dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, sulitnya memperoleh ijin dari Pemerintah Negeri Sabah juga menjadi faktor yang menghambat peran KJRI Kota Kinabalu. Ketiga fungsi tersebut adalah upaya yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu untuk mewujudkan kepentingan nasional RI di bidang pendidikan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945. Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan kebutuhan suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional Indonesia adalah perluasan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah. Melalui perluasan akses pendidikan tersebut, anak-anak BMI di Sabah diharapkan memiliki bekal untuk kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang. Sehingga sebagai generasi penerus Bangsa Indonesia, mereka mendapatkan nasib yang lebih baik dan tidak lagi harus mengikuti jejak orang tua mereka sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pembentukan karakter nasionalisme dalam diri anak-anak BMI di Sabah juga merupakan tujuan dari kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Menurut pengamatan peneliti, hasil dari upaya Pemerintah Indonesia untuk membentuk karakter nasionalisme dalam diri anak-anak BMI di Sabah dapat dilihat ketika anak-anak tersebut antusias dalam mempelajari seni dan budaya Indonesia di setiap proses kegiatan belajar. Melalui pembentukan karakter nasionalisme tersebut, anak-anak BMI di Sabah diharapkan mampu mengenal dan mencintai tanah air Indonesia, serta memiliki jiwa patriotisme walaupun mereka tinggal di luar wilayah Indonesia.

Penutup

Peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sabah yang dilakukan melalui fungsi *representing* untuk mewakili kepentingan nasional Pemerintah Indonesia

dan WNI di Sabah, fungsi *negotiating* untuk mendapatkan perijinan pendirian akses pendidikan di Sabah, dan *protection* dalam melindungi kepentingan WNI di Sabah sudah optimal, namun masih menemui berbagai faktor yang menghambat peran KJRI Kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan, yaitu faktor internal, yaitu terbatasnya dukungan finansial dan SDM dan faktor eksternal, yaitu ijin dari Pemerintah Negeri Sabah, kurangnya kesadaran orangtua dari anak-anak BMI akan pentingnya pendidikan, dan lokasi akses pendidikan yang jauh dari tempat tinggal. Tujuan Pemerintah Indonesia dalam pembentukan karakter (*characters building*) nasionalisme di dalam diri anak-anak BMI masih belum sesuai yang diharapkan, karena jumlah SDM masih belum mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah anak-anak BMI di Sabah. Dalam skala hubungan internasional, KJRI Kota Kinabalu memiliki peran dalam meningkatkan hubungan kerjasama bilateral RI-Malaysia, khususnya bidang pendidikan anak-anak BMI.

Daftar Pustaka

- Diamond, Louise. 1996. *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition*. Connecticut: Kumarian Press.
- Holsti, K. J. 1987. *Politik Internasional: Kerangka Analisa (terj)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Iucu, Oana. 2010. *Diplomacy and Diplomatic Function* [pdf]. PhD Associate Proffesor.
- Permana, Suwandi. 2015. *Memorandum Akhir Tugas (Periode September 2013- Agustus 2015)*. Sabah